



LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2024

PT BPR ARTHAPUSPA MEGA



BAB I
INFORMASI UMUM

1. Susunan Kepengurusan

- Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama : H. Mastika, SE
 - Komisaris : H. Cipto Budhi Prayitno, Drs

- Direksi
 - Direktur Utama : H. Dadi Sumarsana, Drs, SH, MM
 - Direktur : Muminatus Solihah, SPd

Daftar Riwayat Hidup Pengurus

- 1. Nama : H. Mastika, SE
- Tempat, tgl lahir : Denpasar, 4 Juli 1963
- Status : Menikah
- Agama : Islam
- Kewarganegaraan : WNI (pribumi)
- Pekerjaan : Swasta
- Alamat : Jl. Gede Giri No. 36 RT.22/06 Ds. Pegirikan, Kec. Talang – Tegal

PENDIDIKAN UMUM

- 1. Sekolah Menengah Atas Negeri I Negara, Bali, tamat tahun 1983
- 2. Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Malang, Jurusan Manajemen (Status Disamakan), selesai tahun 1988

PENDIDIKAN PROFESI

Mengikuti Ujian Sertifikasi Profesional Komisaris BPR dan dinyatakan KOMPETEN dengan nomor 64131 1120 6 0092 2024 tanggal 18 Maret 2024.

PENGALAMAN KERJA

- 1. Tahun 1988 – 1989 : Sebagai Account Executif di PT. Rejeki Cipta Makmur (Future Trading) - Jakarta
 - 2. Tahun 1990 - 1993 : Kepala Bagian Kredit dan Marketing di PT. BPR PondokGede - Jakarta
 - 3. Tahun 1994 – Okt 2006 : Sebagai Direktur Utama di PT. BPR Arthapuspa Mega
 - 4. 07 Okt 2006 – 06 Okt 2021 : Sebagai Direktur di PT. BPR Arthapuspa Mega
 - 5. 06 Okt 2021 – sekarang : Sebagai Komisaris Utama di PT. BPR Arthapuspa Mega
-
- 2. Nama : H. Cipto Budhi Prayitno, Drs
 - Tempat, tgl lahir : Brebes, 14 April 1964
 - Status : Menikah
 - Agama : Islam

Kewarganegaraan : WNI (pribumi)
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Jl. Kalimantan 392 RT.02 RW.02
 Limbangan Wetan – Kec. Brebes
 Kabupaten Brebes

PENDIDIKAN UMUM

1. Sekolah Menengah Atas Negeri I Brebes, tamat tahun 1983
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus Semarang, selesai tahun 1992

PENDIDIKAN PROFESI

Mengikuti Ujian Sertifikasi Profesional Komisaris BPR dan dinyatakan KOMPETEN dengan nomor 64127 1120 6 0999 2021 tanggal 12 Juli 2021.

PENGALAMAN KERJA

1. Tahun 1992– 1993 : Sebagai Staf Pembantu Loker Losari di Bank Pasar Brebes
 2. Tahun 1993 – 1994 : Sebagai Pjs Loker Pembantu Brebes di Bank Pasar Brebes
 3. Tahun 1994 – 1995 : Sebagai Kasie Kredit di Bank Pasar Brebes
 4. Tahun 1995 – 1999 : Sebagai Kepala Bagian Pemasaran di Bank Pasar Brebes
 5. Tahun 1999 – 2005 : Sebagai Kepala Bagian SPI di PD. BPR. Puspa Kencana Brebes
 6. Tahun 2005 – 2013 : Sebagai Direktur Utama di PD. BPR. Puspa Kencana Brebes
 7. Tahun 2013 – 2015 : Sebagai Pelaksana Dana Kantor Pelayanan Ketanggungan di PD. BPR. Puspa Kencana Brebes
 8. Tahun 2015 – 2018 : Sebagai Pelaksana Kredit DPK Kantor Pusat di PD. BPR. Puspa Kencana Brebes
 9. Tahun 2018 – Feb 2019 : Sebagai Kasubag Dana di PD. BPR. Puspa Kencana Brebes
 10. Feb 2019 – Feb 2020 : Sebagai Kepala Bagian Umum di PD. BPR. Puspa Kencana Brebes
 11. 1 Apr 2020 – 30 Apr 2020 : Masa Persiapan Pensiun (MPP)
 12. 1 Mei 2020 : Memasuki Masa Pensiun
 13. 06 Okt 2021 – sekarang : Sebagai Komisaris independen di PT. BPR Arthapuspa Mega
-
3. Nama : H. Dadi Sumarsana, Drs, SH, MM
 Tempat, tgl lahir : Magelang, 27 Desember 1965
 Status : Menikah
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : WNI (pribumi)
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Ds. Tonggara RT.09/03 Kec.Kedungbanteng – Tegal

PENDIDIKAN UMUM

1. SMA M, Minggir, Sleman Yogyakarta, tamat tahun 1984

2. Universitas Terbuka, tamat tahun 1991
3. S1 Fakultas Hukum Universitas Panca Sakti Tegal, selesai Maret 2007
4. S2 Magister Manajemen di Universitas STIKUBANK Semarang, selesai Maret 2019

PENDIDIKAN PROFESI

Mengikuti Ujian Sertifikasi Profesional Direktur BPR dan dinyatakan KOMPETEN dengan nomor 64127 1120 6 080 2023 tanggal 14 Maret 2023.

PENGALAMAN KERJA

1. Tahun 1984 – 1986 : Staf Administrasi di PT. Intan Belindo Jakarta
 2. Tahun 1986 – 1988 : Bekerja di AJB Bumiputera Magelang
 3. Tahun 1988 – 1991 : Wiraswasta Pengolahan Tembakau di Magelang
 4. Tahun 1991 – 1995 : Kepala Divisi Marketing Kredit di PT. BPR Pondok Gede Jakarta
 5. Tahun 1995 – 1998 : Kabag. Dana di PT. BPR Arthapuspa Mega
 6. Tahun 1998 – 2006 : Direktur di PT. BPR Arthapuspa Mega
 7. Tahun 2006 – sekarang : Direktur Utama di PT. BPR Arthapuspa Mega
-
4. Nama : Muminatus Solihah
 - Tempat, tgl lahir : Tegal, 7 Oktober 1983
 - Status : Menikah
 - Agama : Islam
 - Kewarganegaraan : WNI (pribumi)
 - Pekerjaan : Swasta
 - Alamat : Perum Pesona Abadi Blok D1 No. 8 RT.006/006 Desa Slawi Kulon, Kec. Slawi - Tegal

PENDIDIKAN UMUM

1. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Slawi, tamat tahun 2001
2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panca Sakti – Tegal, selesai tahun 2011

PENDIDIKAN PROFESI

Mengikuti Ujian Sertifikasi Profesional Direktur BPR dan dinyatakan KOMPETEN dengan nomor 64127 1120 6 1895 2022 tanggal 7 November 2022.

PENGALAMAN KERJA

1. Tahun 2001 – 2010 : Sebagai kasir di PT. BPR Arthapuspa Mega
2. Tahun 2010 – 15 Des 2022 : Sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelayanan di PT. BPR Arthapuspa Mega
3. 16 Des 2022 – sekarang : Sebagai Direktur PT. BPR Arthapuspa Mega

Susunan Pejabat Eksekutif

Kepala Bagian Penyehatan dan Pengamanan Kredit : Aris Yulianto, AMd

Kepala Bagian Kredit	:	Moh. Syaefudin Munir, SIP
Kepala Bagian Dana	:	Kusnoro, SE
Kepala Bagian Operasional	:	Nunik Winda Silviani, SP
PE Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU, PPT dan PPPSPM	:	Endah Pamulatsih, SE
Plt PE Audit Intern	:	Adi Apri Maryanto, AMd

Daftar Riwayat Hidup Pejabat Eksekutif

- Nama
Tempat,tgl lahir
Status
Agama
Kewarganegaraan
Pekerjaan
Alamat

:
:
:
:
:
:
:

Aris Yulianto, AMd
Tegal, 25 Juli 1975
Menikah
Islam
WNI (pribumi)
Karyawan Swasta
Jl. Menjangan RT.03/02 Ds. Trayeman
Kec.Slawi – Tegal

PENDIDIKAN UMUM

- Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Slawi, tamat tahun 1994
- Akademi Keuangan dan Perbankan Surakarta, selesai tahun 1998

PENDIDIKAN PROFESI

Mengikuti Ujian Sertifikasi Profesional Direktur BPR dan dinyatakan KOMPETEN dengan nomor 64127 1120 6 1208 2021 tanggal 25 Oktober 2021.

PENGALAMAN KERJA

- Tahun 1998 – 2005
Tahun 2005 – 2010
Tahun 2010 – 2012
Tahun 2012 – Mar 2015

:
:
:
:

Sebagai Marketing Kredit di PT. BPR Arthapuspa Mega
Sebagai Kepala Marketing Kredit di PT. BPR Arthapuspa Mega
Sebagai Kasie Umum di PT. BPR Arthapuspa Mega
Sebagai anggota Credit Risk Management (CRM) di PT. BPR Arthapuspa Mega
- Maret 2015 – 25 Jan 2022
26 Jan 2022 – 21 Juli 2024
22 Juli 2024 – sekarang

:
:
:

Sebagai Manager Pemasaran di PT. BPR Arthapuspa Mega
Sebagai Kepala Bagian Kredit di PT. BPR Arthapuspa Mega
Sebagai Kepala Bagian Penyehatan dan Pengamanan Kredit di PT. BPR. Arthapuspa Mega
- Nama
Tempat,tgl lahir
Status
Agama
Kewarganegaraan
Pekerjaan
Alamat

:
:
:
:
:
:
:

Moh. Syaefudin Munir, SIP
Tegal, 30 Juli 1974
Menikah
Islam
WNI (pribumi)
Karyawan swasta
Desa Jatinegara RT. 001/01 Kec. Jatinegara

- Tegal

PENDIDIKAN UMUM

1. SUPM Negeri Tegal , tamat tahun 1992
2. STIA YAPPANN, Jurusan Administrasi Niaga, selesai tahun 2000

PENDIDIKAN PROFESI

Mengikuti ujian Sertifikasi Profesional Pejabat Eksekutif Bisnis dan Operasional dan dinyatakan KOMPETEN dengan nomor 64131 1346 5 1344 2023 tanggal 5 September 2023.

PENGALAMAN KERJA

1. Tahun 2007 - 2011 : Marketing Kredit PT. BPR Arthapuspa Mega
 2. Tahun 2014 - 2017 : Kepaka KPK Kankas Kemantran PT. BPR Arthapuspa Mega
 3. Tahun 2017 – 22 Juli 2024 : Kepala KPK Kankas Tuwel di PT. BPR Arthapuspa Mega
 4. 22 Juli 2024 - sekarang : Kepala Bagian Kredit PT. BPR Arthapuspa Mega
-
3. Nama : Kusnoro, SE
Tempat,tgl lahir : Cilacap, 10 Juni 1970
Status : Menikah
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI (pribumi)
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Jalan Brayan 02 Desa Grobog Kulon RT. 02/06 Kec. Pangkah
- Tegal

PENDIDIKAN UMUM

1. SMA Purnama Majenang, tamat tahun 1991
2. Fakultas Ekonomi Universitas Surapati, Jurusan Manajemen, selesai tahun 2004

PENDIDIKAN PROFESI

-

PENGALAMAN KERJA

1. Tahun 1995 - 1998 : Marketing Dana PT. BPR Arthapuspa Mega
 2. Tahun 1998 - 2006 : Marketing Kredit PT. BPR Arthapuspa Mega
 3. Tahun 2006 – 2010 : Kepala Bagian Kredit di PT. BPR Arthapuspa Mega
 4. Tahun 2010 - 2015 : Kepala Kantor Pelayanan Kas PT. BPR Arthapuspa Mega
 5. Tahun 2015 – 2019 : Anggota CRM PT. BPR Arthapuspa Mega
 6. Tahun 2019 – 25 Jan 2022 : Kepala Pemasaran Dana PT. BPR Arthapuspa Mega
 7. 26 Jan 2022 – sekarang : Kepala Bagian Dana PT. BPR Arthapuspa Mega
-
4. Nama : Nunik Winda Silviani, SP
Tempat,tgl lahir : Tegal, 19 April 1984
Status : Menikah
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI (pribumi)

Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Jalan Rajawali 4 No.51 RT.03/09 Desa Slawi Kulon –
Kec. Slawi - Tegal

PENDIDIKAN UMUM

1. Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Slawi, tamat tahun 2002
2. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, Jurusan Agronomi, selesai tahun 2006

PENDIDIKAN PROFESI

Mengikuti ujian Sertifikasi Profesional Pejabat Eksekutif Bisnis dan Operasional dan dinyatakan KOMPETEN dengan nomor 64131 1346 5 1344 2023 tanggal 5 September 2023.

PENGALAMAN KERJA

1. Tahun 2007 - 2010 : Customer Service di PT. BPR Arthapuspa Mega
2. Tahun 2010 - 2011 : Admin Dana di PT. BPR Arthapuspa Mega
3. Tahun 2011 - 2012 : Kasie Dana di PT. BPR Arthapuspa Mega
4. Tahun 2012 – 2015 : Staf Bagian Umum di PT. BPR Arthapuspa Mega
5. Tahun 2016 – 15 Des 2022: Kepala Sub Bagian Sekretariat, Umum dan Rumah Tangga di PT. BPR Arthapuspa Mega
6. Tahun 2022 – 24 Sep 2024 : Plt Kepala Bagian Operasional di PT. BPR Arthapuspa Mega
7. 24 Sep 2024 – sekarang : Kepala Bagian Operasional di PT. BPR Arthapuspa Mega

5. Nama : Endah Pamulatsih, SE
Tempat,tgl lahir : Tegal, 15 September 1974
Status : Menikah
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI (pribumi)
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Jl. Sumatra No.12 RT.3/4 Kelurahan Kudaile
Kec. Slawi – Tegal

PENDIDIKAN UMUM

1. Sekolah Menengah Ekonomi Atas Negeri Slawi, tamat tahun 1993
2. Fakultas Ekonomi Universitas Attahiriyah Jakarta, jurusan Manajemen, selesai tahun 2012

PENDIDIKAN PROFESI

Mengikuti ujian Sertifikasi Profesional Direktur BPR dan dinyatakan KOMPETEN dengan nomor 64127 1120 6 1779 2021 tanggal 25 November 2021.

PENGALAMAN KERJA

1. Tahun 1994 – 1998 : Sebagai Staf Akunting di PT. BPR Arthapuspa Mega
2. Tahun 1998 – 2000 : Sebagai Kasir di PT. BPR Arthapuspa Mega

3. Tahun 2000 – 2006 : Sebagai Akunting di PT. BPR Arthapuspa Mega
4. Tahun 2006 –2010 : Sebagai Kabag Umum di PT. BPR Arthapuspa Mega
5. Tahun 2010 – Mei 2013 : Sebagai Satuan Pengawas Intern di PT. BPR Arthapuspa Mega
6. Mei 2013 – Mar 2015 : Sebagai Manager Kredit di PT. BPR Arthapuspa Mega
7. Mar 2015 – 15 Des 2022 : Sebagai Manager Operasional yang menjalankan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta Kepala UKK APU dan PPT di PT. BPR Arthapuspa Mega
8. 16 Des 2022 – Sekarang : Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta Kepala UKK APU,PPT dan PPPSPM di PT. BPR Arthapuspa Mega

2. Kepemilikan

No.	Nama	Jumlah Saham (Ribuan Rp.)	%
1.	Hj. Nani Iriani	Rp 2.932.300,00	41,89
2.	Hj. Umi Yasaroh, SE	Rp 2.014.500,00	28,78
3.	H. Dadi Sumarsana, Drs, SH, MM	Rp 933.200,00	13,33
4.	H. Mastika, SE	Rp 770.000,00	11,00
5.	H. Dekrit Yoelianto, Ir	Rp 350.000,00	5,00
	Jumlah	Rp 7.000.000,00	100,00

1. Perkembangan Usaha BPR

a.) Riwayat Ringkas Pendirian BPR

PT. BPR Arthapuspa Mega yang berkedudukan di Jalan Raya Selatan No.21 Adiwerna Kabupaten Tegal didirikan pada tanggal 20 Desember 1993 sesuai Akte Nomor : 81 Notaris Tahir Kamili, Sarjana Hukum, Notaris di Ciputat dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 21 Februari 1994 Nomor : C2-2946-HT.01.01.Tahun 1994. Anggaran Dasar mana selanjutnya diubah seluruhnya dengan akta tanggal 17 September 1998 Nomor : 2 yang dibuat di hadapan Tuan Harizantos,Sarjana Hukum,Notaris di Slawi, diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 10 tanggal 7 Oktober 2006, dan perubahan Anggaran Dasarnya dengan akta No. 10 A tanggal 10 Oktober 2006 yang dibuat di hadapan Mokhamad Wakhyudin, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tegal, Akta No. 67 tanggal 27 Maret 2007 yang dibuat di hadapan Mokhamad Wakhyudin, Sarjana Hukum, Notaris di Adiwerna Kabupaten Tegal dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : W9-HT.01.04.-230 tanggal 10 Mei 2007, perubahan akta No. 10 tanggal 2 Oktober 2008 yang dibuat di hadapan Agus Priyantoko, SH dan perubahan terakhir anggaran dasar PT. BPR Arthapuspa Mega Akta No. 01 tanggal 19 September 2024 yang dibuat di hadapan Agus Miftah, SH Notaris di Kabupaten Tegal.

PT. BPR Arthapuspa Mega beroperasi berdasarkan SK dari Menteri Keuangan No.Kep-158/Km.17/1994 tanggal 22 Juni 1994. Mulai beroperasi tanggal 15 Juli 1994 dengan bidang usaha sebagai bank perkreditan rakyat yang menjalankan fungsi menghimpun dana masyarakat berupa tabungan dan deposito serta menyalurkan kembali dalam bentuk kredit yang diberikan. BPR berkedudukan di Jalan Raya Selatan No. 21 Adiwerna – Tegal dengan lokasi utama kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal serta sebagian Brebes dan Pemalang.

b.) Ikhtisar Data Keuangan Penting

Mengevaluasi perkembangan tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa kondisi PT. BPR Arthapuspa Mega mengalami penurunan kinerja.

Dalam menilai kondisi bank, indikator yang digunakan adalah perkembangan volume usaha dan tingkat kesehatan bank. Tinjauan kinerja keuangan yang diuraikan pada bab ini menyajikan pencapaian kinerja keuangan per 31 Desember 2024, meliputi pendapatan operasional dan non operasional, beban operasional dan operasional, serta laba usaha sebelum dan setelah pajak.

Aset bank turun sebesar Rp 9.154.840.550,00 dari tahun 2023 atau terdapat penurunan aset sebesar 8,25%. Total aset tahun 2023 sebesar Rp 110.918.517.000,00 turun menjadi Rp 101.763.675.980,00 pada tahun 2024. Peningkatan aset ini terutama berasal dari Simpanan dari Bank Lain.

Peningkatan pos pasiva di antaranya :

- Peningkatan Simpanan dari Bank Lain dari Rp 22.992.674 ribu menjadi Rp 31.485.917 ribu (36,94 %)
- Peningkatan Dana Pihak Ketiga yaitu deposito berjangka dari Rp 27.504.800 ribu menjadi Rp 34.674.600 ribu (26,07 %)
- Peningkatan Dana Pihak Ketiga yaitu tabungan dari Rp 25.210.498 ribu menjadi Rp 31.906.896 ribu (26,56 %)

Peningkatan pos aktiva di antaranya :

- Peningkatan Penempatan pada bank lain dari Rp 13.362.565 ribu menjadi Rp 23.811.828 ribu (78,20 %)
- Peningkatan Kredit yang Diberikan dari Rp 69.184.282 ribu menjadi Rp 78.590.948 ribu (13,59 %)
- Peningkatan Aset Tetap berupa Tanah dan Gedung dari Rp 3.289.788 ribu menjadi Rp 4.056.288 ribu (23,30 %)
- Pendapatan operasional naik dari Rp 13.501.236 ribu menjadi Rp 15.703.471 ribu atau naik sebesar 16,31% dan Pendapatan non-operasional naik dari Rp 132.568 ribu menjadi Rp 196.680 ribu atau naik sebesar 48,36%.
- Beban operasional naik dari Rp 11.316.145 ribu menjadi Rp 13.855.019 ribu atau naik sebesar 22,44% dan beban non operasional turun dari Rp 43.065 ribu menjadi Rp 39.964 ribu atau turun sebesar 7,20%.
- Laba sebelum pajak penghasilan mengalami penurunan sebesar 11,84% dari Rp 2.274.594 ribu menjadi Rp 2.005.178 ribu.
- Taksiran pajak penghasilan turun sebesar 5,87% dari menjadi Rp 440.311 ribu menjadi Rp 414.462 ribu.
- Laba bersih setelah pajak penghasilan turun sebesar 13,28% dari Rp 1.834.283 ribu menjadi Rp 1.590.716 ribu

c.) Rasio Keuangan

Berdasarkan POJK No. 3/POJK.03/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maka BPR wajib melakukan

penilaian sendiri (self assessment) atas tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko dengan cakupan penilaian terhadap faktor :

1. Profil Risiko
- ii. Tata Kelola
- iii. Rentabilitas
- iv. Permodalan

yang dilakukan melalui analisis yang komprehensif dan terstruktur dan wajib menyampaikan hasil penilaian tersebut setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut adalah perkembangan dan pertumbuhan PT. BPR Arthapuspa Mega yang diukur melalui rasio-rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan manajemen mengelola usaha secara ekonomis, efektif dan efisien. Adapun rasio-rasio keuangan per 31 Desember 2024 terdiri dari beberapa aspek meliputi : Cash Ratio, LDR, BOPO, NPL Net, KAP, ROA, PPAP, KPMM, NIM dan MIAPB.

- (a.) ROA (Return On Asset) : 0,76 %
Rasio ROA adalah perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset.
- (b.) BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) : 94,67%
Rasio BOPO adalah perbandingan beban operasional terhadap Pendapatan operasional
- (c.) NIM (Net Interest Margin) : 8,97%
Rasio NIM adalah perbandingan antara Pendapatan Bunga Bersih dengan Rata-rata aset produktif.
- (d.) KPMM (Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum) : 21,14%
Rasio KPMM adalah perbandingan antara modal inti ditambah modal pelengkap dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
- (e.) MIAPB (Modal inti terhadap Aset Produktif Bermasalah) : 52,68%
Rasio MIAPB adalah perbandingan Modal Inti dengan Aset Produktif Bermasalah.

d.) Penjelasan Mengenai NPL

Rasio penilaian kualitas kredit menggunakan rasio KAP (Kualitas Aktiva Produktif) dan NPL (Non Performing Loan). KAP sebesar 13,33% dan NPL Netto 19,10%.

Sebab-sebab timbulnya kredit bermasalah antara lain :

- a. Faktor Intern
 - Kompetensi petugas analisa kredit masih terus harus ditingkatkan
 - Kompetensi pejabat dalam melakukan verifikasi dan pengawasan atas tugas-tugas timnya perlu ditingkatkan
 - Monitoring kredit pasca realisasi belum optimal
 - Monitoring PAR kurang konsisten
 - Masih ditemukan pemberian persetujuan kredit yang kurang memperhatikan usulan/hasil analisa
- b. Faktor Ekstern
 - Masih adanya beberapa debitur yang belum pulih dari dampak Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan usaha debitur mengalami penurunan omset, bahkan tutup yang berakibat debitur masuk NPL
 - Debitur mengalami perubahan karakter menjadi tidak baik

- Debitur tidak mampu bersaing dengan kompetitor yang serba online

e.) Perkembangan Usaha Yang Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap BPR

Tidak Ada.

2. Strategi dan Kebijakan Manajemen Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BPR

Pencapaian tujuan BPR tidak saja diukur oleh parameter-parameter yang bersifat kuantitatif, seperti pertumbuhan kinerja keuangan, namun juga diukur oleh pencapaian kinerja yang bersifat kualitatif seperti kemampuan manajemen dalam menjaga dan meningkatkan citra dan *value* BPR bagi segenap *stakeholder* dan *shareholder*. Sepanjang tahun 2024 PT. BPR Arthapuspa Mega telah merealisasikan beberapa rencana kerja yang bersifat kualitatif. Beberapa kebijakan pengembangan yang telah direalisasikan adalah sebagai berikut :

(a.) Peningkatan Kualitas Kinerja BPR

Beberapa kebijakan yang telah dilakukan untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja BPR antara lain :

1. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dan Auditor Independen
2. Senantiasa melakukan evaluasi dan penyesuaian tingkat suku bunga kredit dan/atau biaya provisi kredit dan tingkat suku bunga simpanan, baik terhadap ketentuan/regulasi yang berlaku maupun terhadap dinamika yang berkembang
3. Melakukan perubahan struktur organisasi
4. Senantiasa melakukan penyempurnaan terhadap keputusan Direksi, khususnya yang berkaitan dengan tata kerja organisasi dan ketentuan yang mengatur kegiatan operasional BPR
5. Meningkatkan digitalisasi dalam pelayanan dan pemasaran

(b.) Peningkatan Kualitas dan daya dukung Sumber Daya Manusia (SDM) BPR

Untuk meningkatkan kapabilitas kompetensi dan profesionalisme SDM BPR, telah pula direalisasikan program-program pengembangan kualitas SDM melalui beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik secara in house maupun dalam bentuk partisipasi pada event pengembangan SDM yang diselenggarakan oleh lembaga lain.

Secara garis besar, program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan antara lain meliputi :

- (1.) Menyelenggarakan pelatihan motivasi dan pelatihan profesi secara in house training, khususnya bagi pegawai baru
- (2.) Mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan/workshop/seminar yang diselenggarakan oleh lembaga, instansi dan organisasi asosiasi
- (3.) Kegiatan-kegiatan lain yang menunjang peningkatan kualitas SDM

PT. BPR Arthapuspa Mega senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian serta mengedepankan pendekatan manajemen risiko dalam semua kegiatan operasionalnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari risiko yang dapat terjadi dan berakibat merugikan bank. Identifikasi dan pengendalian risiko tersebut diterapkan pada beberapa aspek antara lain :

1. Risiko Kredit

Identifikasi terhadap risiko kredit dilakukan dengan cara menyusun kebijakan perkreditan yang dijadikan pedoman oleh seluruh bagian terkait dalam proses pemberian kredit. Pengendalian kredit dilakukan dengan cara diberlakukannya ketentuan berupa Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan dan Surat Keputusan Direksi yang mengatur tentang survey dan Rapat Komite Kredit dengan menganut asas *four eyes principles*.

Untuk mengurangi risiko terjadinya kredit macet telah ditempuh beberapa strategi dan kebijakan antara lain :

- a.) Menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk mengcover debitur/penerima kredit
- b.) Melakukan analisa secara cermat dalam setiap pemberian kredit
- c.) Menggunakan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk mengetahui karakter dan riwayat calon debitur
- d.) Melakukan pengikatan agunan secara notariil
- e.) Melakukan monitoring kepada seluruh debitur baik secara aktif maupun pasif
- f.) Menyempurnakan beberapa ketentuan dalam analisa kredit
- g.) Menyempurnakan kebijakan tentang Restrukturisasi Kredit
- h.) Merubah Kewenangan Survey dan Komite Kredit

2. Risiko Operasional

Identifikasi terhadap risiko operasional dilakukan dengan cara merumuskan kelemahan-kelemahan sistem dan prosedur yang dimiliki dan meninjaunya kembali.

Pengendalian terhadap risiko operasional dilakukan dengan menerapkan SOP di semua lini operasional sehingga setiap aktivitas usaha dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan bank.

Untuk meminimalisir terjadinya risiko operasional telah diterapkan beberapa kebijakan yaitu :

- (a.) Menerapkan pembatasan transaksi di teller secara berjenjang
- (b.) Pencetakan nomor seri pada formulir/slip penyetoran dan penarikan tabungan
- (c.) Menerapkan pengendalian ganda (*dual control*) pada setiap transaksi
- (d.) Pengawasan intern yang lebih efektif
- (e.) Menerapkan Strategi Anti Fraud
- (f.) Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai

3. Risiko Kepatuhan

Identifikasi terhadap risiko kepatuhan dilakukan dengan cara menjalankan ketentuan dan peraturan yang berlaku, baik internal maupun eksternal. Pelanggaran terhadap berbagai peraturan dapat diukur dari seberapa sering pengenaan sanksi administratif maupun sanksi denda kepada bank. Perjanjian kredit dilakukan secara tertulis dan mengacu pada peraturan tentang perlindungan konsumen. Bahwa agunan kredit dan perikatannya telah memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendaliannya adalah dengan cara BPR selalu memprioritaskan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan OJK dan KAP dan mengupayakan penerapan regulasi dan ketentuan baru sesegera mungkin.

4. Risiko Likuiditas

Identifikasi terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan cara pemantauan secara rutin persediaan likuiditas. Pengendalian likuiditas dilakukan dengan cara mempertahankan minimal *cash ratio* sebesar 10 % serta selalu menjaga keseimbangan antara kebutuhan dana yang diperlukan baik untuk pelayanan kredit maupun menyediakan dana apabila penabung atau deposan melakukan penarikan dana. Maturity profile dibuat setiap awal bulan untuk memproyeksi kebutuhan likuiditas dalam bulan bersangkutan dan pemantauannya dilakukan setiap hari.

5. Risiko Reputasi

Identifikasi terhadap risiko reputasi dilakukan dengan cara memantau setiap pengaduan nasabah yang masuk ke bank baik secara langsung maupun melalui kotak saran yang telah disediakan baik di pusat maupun di kantor kas serta melalui portal OJK. Pengendaliannya adalah dengan cara memberikan pelayanan yang prima dan transparansi produk kepada nasabah serta menindaklanjuti setiap pengaduan secepat mungkin pada kesempatan pertama sesuai ketentuan. Pada tahun 2024 tidak terdapat pengaduan di portal APPK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen)

6. Risiko Strategik

Identifikasi terhadap risiko strategik dilakukan dengan cara mengkaji terlebih dahulu setiap aktivitas dan produk bank, baik produk dana maupun produk kredit sebelum diluncurkan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap usaha bank. Pengendaliannya adalah dengan cara merumuskan setiap kebijakan dengan mengacu pada ketentuan dan kondisi pasar yang ada.

3. **Laporan Manajemen Mengenai Pengelolaan BPR dalam rangka Tata Kelola yang baik**

(a) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PT. BPR Arthapuspa Mega adalah :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : H. Mastika, SE
Komisaris : H. Drs. Cipto Budhi Prayitno

DIREKSI

Direktur Utama : H. Dadi Sumarsana, Drs, SH, MM
Direktur : Muminatus Solihah, SPd

AUDIT INTERN

PE Audit Intern : Adi Apri Mariyanto, AMd
Staf Audit Intern : Anton Surya Jaya, SH

BAGIAN KREDIT

Kepala Bagian Kredit : Moh. Syaefudin Munir, SIP

Kepala Pemasaran Wilayah

- 1.) Pusat : -
- 2.) Tuwel : Ade Suyanto
- 3.) Dukuhwaru : Wiratama, AMd

- 4.) Kemantran : Willi Kurnia Firmansyah, SE
- 5.) Brebes Utara : Arief Eko Bani Aji, SE

Account Officer (AO)

- 1. Akhmad Ghozin
- 2. Imam Tantowi
- 3. Muhamad Amar Syakir
- 4. Farid Anwar
- 5. Septian Wilis
- 6. Heriyanto
- 7. Nurfasikhin
- 8. Burhanudin Mulia
- 9. Nur Wahid Qomarudin
- 10. Novan Aji Purwantoro, SE
- 11. Rian Setiawan
- 12. Mufti Aji Purnomo
- 13. Irfan Nurfariski
- 14. Yoki Afrianto
- 15. Andang Juang Citra Nugraha
- 16. Khoerul Umam
- 17. Maulana Furqon
- 18. Yogi Prasetyo
- 19. Diding Supriadi (Training)
- 20. Ihsan Ahsanul Afif (Training)

BAGIAN DANA

Kepala Bagian Dana : Kusnoro, SE

Funding Officer (FO) :

- i. Budiman
- ii. Yafiris Dasyauki
- iii. Rizka Sukmaning Esti
- iv. Melani Nurul Amalia
- v. Asiyah Afindi
- vi. Romadhona Dwi Harnianto

Admin Dana : Sukma Bening

BAGIAN PENYEHTATAN DAN PENGAMANAN KREDIT

Kabag Penyehtatan dan Pengamanan Kredit : Aris Yulianto, AMd

Anggota : Miftah Apriansyah

Arif Tangguh Pristiwanto,SH
Endi Sandi Suwardi
Tunggul Widodo
Koko Kristianto

Admin Hatman : Greffina Rhendiantika

BAGIAN OPERASIONAL

Kepala Bagian Operasional : Nunik Winda Silviani, SP

(a.) Credit Operational (CO)

Kasubag CO : Imam Dwi Raharjo, AMd
Staf CO : 1. Bati Trisnaningsih,SH
2. Hari Armansyah
3. Sesha Hertiani Putri, SE

(b.) Pelayanan dan Keuangan

Plt Kasubag Pelayanan dan Keuangan : Dwi Shinta Apriliani
Staf Akunting : Mahardika Dandy N.
Teller : 1. Brian Bhagaskara Putra
2. Ainur Rohiyah
3. Catur Pamungkas
4. Retno Purwantika
5. Indah Faizatunnimah
6. Hanna Arditia M., Amd

Customer Service : -

(c.) Sekretariat, Umum dan Rumah Tangga (SEKURT)

Plt Kasubag SEKURT : Eka Yuni Sulistiana, SE

Staf Umum : -
Non Struktur : 1.Eka Ade Putra (Satpam)
2. Priyo Subeno (Driver)
3. Kunali (OB)
4. Slamet Untung Karjono (OB)
5. Kardono (OB)
6. M Arif Bani Kiswoyo (OB)

KEPATUHAN, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPALA UKK APU, PPT dan PPPSPM
PE Kepatuhan,Manajemen Risiko dan Kepala UKK APU,PPT dan PPPSPM : Endah P., SE

(b) Bidang usaha sesuai anggaran dasar dan kegiatan utama

Aktivitas utama BPR adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka serta menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit terutama untuk kredit modal kerja.

Dalam kaitan kegiatan usaha tersebut, PT. BPR Arthapuspa Mega memiliki beberapa produk perbankan sebagai berikut :

a. Simpanan

Produk simpanan PT. BPR Arthapuspa Mega adalah : Tabungan Masal, Tabungan Masal Berhadiah, Tabungan Wajib, Tabungan Anak Sekolah (TAS), Tabungan Anak Sekolah Plus (TASPLUS), Tabungan Hari Raya (TAHARA), Tabungan BPIH/U, Tabungan Simpel (Simpanan Pelajar), Tabungan Arrah, TabunganKu, Tabungan SIMUDA dan Deposito Berjangka

b. Kredit

Produk kredit PT. BPR Arthapuspa Mega adalah Kredit MASAL (Masyarakat Tegal) : Kredit Umum, Kredit Talangan, Kredit Musiman dan Kredit Pegawai

(c) Teknologi informasi

Penerapan Tata Kelola dalam rangka penyelenggaraan Teknologi Informasi adalah :

1. Penyelenggaraan teknologi informasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku bagi BPR
2. Aplikasi inti perbankan telah mampu melakukan pembukuan transaksi antar kantor pada hari yang sama dengan melihat hasil konsolidasinya
3. Segala output laporan yang dihasilkan telah sesuai dengan format dan ketentuan OJK
4. Telah melakukan pengujian dengan mencermati hasil/output system secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali
5. Back up data berjalan dengan baik setiap hari
6. Menjaga keamanan ruang server
7. Penyedia jasa Teknologi informasi (dalam hal ini PT. Mitranet Software Online) mampu menjaga keamanan data dan informasi termasuk rahasia bank dan data pribadi nasabah
8. Melakukan pemantauan reputasi pihak penyedia jasa teknologi informasi dan kelangsungan penyediaan layanan kepada BPR (memperbaharui Perjanjian Kerjasama minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila ada perubahan)
9. Memberikan batasan otorisasi bagi pengguna informasi

(d) Perkembangan dan target pasar

Perkembangan dan target pasar yang menjadi pasar sasaran adalah segmen perdagangan karena segmen ini dinilai mampu bertahan.

(e) Jumlah, jenis dan lokasi kantor

PT. BPR Arthapuspa Mega menjalankan seluruh aktivitas kegiatan operasional usahanya di kantor pusat yang berkedudukan di Jalan Raya Selatan No. 21 Tembok Luwung – Kec. Adiwerna – Kab.Tegal dan didukung 4 (unit) unit kantor kas yakni :

1. Kantor Kas Tuwel berlokasi di Jalan Raya Tuwel No. 7 Tuwel – Kec. Bojong – Kab. Tegal
2. Kantor Kas Kemantran di Jalan Raya Garuda No. 143 Bumiharja – Kec. Tarub – Kab. Tegal
3. Kantor Kas Dukuhwaru di Jalan Abimanyu No. 1 Blubuk – Kec. Dukuhwaru – Kab. Tegal
4. Kantor Kas Brera di Jalan KH. Mukhtar Kel. Pasar Batang – Kab. Brebes.

(f) Kerjasama BPR

Jaringan Kerja meliputi wilayah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang dan sekitarnya. Untuk saat ini BPR belum ada kerja sama dengan bank atau pihak lain dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan kelembagaan.

(g) Kepemilikan oleh anggota Direksi

Tidak ada kepemilikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dalam kelompok usaha BPR karena BPR tidak memiliki kelompok usaha.

(h) Keterkaitan antar pemegang saham

Keterkaitan antar pemegang saham :

Ada hubungan keluarga antar pemegang saham. Sdr. Hj. Nani Iriani selaku pemegang saham dengan porsi 41,89% adalah istri Sdr. H. Dadi Sumarsana, Drs, SH, MM dengan porsi saham 13,33%. Sdr. Hj. Umi Yasaroh, SE selaku pemegang saham dengan porsi 28,78% adalah istri dari Sdr. H. Mastika, SE dengan porsi saham 11,00%.

Keterkaitan antar pengurus :

Tidak ada hubungan keterkaitan antar pengurus, baik antar sesama anggota Direksi, antar sesama anggota Dewan Komisaris maupun antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris.

Keterkaitan antara pemegang saham dengan pengurus

Ada hubungan keluarga antar pemegang saham dan pengurus. Sdr. Hj. Nani Iriani selaku pemegang saham adalah istri dari Sdr. H. Dadi Sumarsana, Drs, SH, MM yang merupakan Direktur Utama sedangkan Sdr. Hj. Umi Yasaroh, SE adalah istri dari Sdr. H. Mastika, SE yang merupakan Komisaris Utama.

(i) Sumber daya manusia

Jumlah dan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Sarjana (Strata 1/2)	38 orang
2.	Sarjana Muda	13 orang
3.	SMA sederajat	16 orang
	Total	67 orang

(j) Kebijakan pemberian gaji

Kebijakan pemberian gaji bagi pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) ditetapkan berdasarkan anggaran dasar melalui RUPS dengan rumusan sebagai berikut :

- Honor/gaji pengurus akan ditinjau satu tahun sekali melalui RUPS setelah penetapan Rencana Bisnis Bank
- Gaji pegawai ditetapkan dengan SK Direksi dengan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris

Kebijakan terkait imbalan kerja

Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan BPR atas jasa yang diberikan oleh pekerja.

Kewajiban imbalan kerja adalah kewajiban yang timbul dari imbalan kerja.

BPR telah menyiapkan kewajiban imbalan kerja bagi pekerja yang telah diangkat sebagai pekerja tetap berupa jaminan asuransi pensiun yakni Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan.

(k) Perubahan penting lainnya

Perubahan penting di BPR yang mempengaruhi operasional BPR dalam tahun 2024 adalah perubahan nomenklatur yaitu semula Bank Perkreditan Rakyat Arthapuspa Mega menjadi Bank Perekonomian Rakyat Arthapuspa Mega.

Dalam rangka penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko BPR, bank telah menyusun SOP (Standar Operating Procedure) Tata Kelola maupun Manajemen risiko BPR dan peraturan-peraturan intern berkenaan dengan hal tersebut.

BAB IV

PENGUNGKAPAN INFORMASI LAIN

(1.) Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan PT. BPR Arthapuspa Mega berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Penyusunan dan penyajian atas laporan keuangan berdasarkan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA-BPR) yang berlaku sejak Januari 2010.

Dasar pengukuran dan pengakuan laporan keuangan adalah Biaya historis dan disusun dengan dasar akrual. Laporan keuangan BPR menggunakan mata uang rupiah penuh. Pada tanggal neraca aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dicatat dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

(2.) Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan

1. Kas

Transaksi Kas diakui sebesar nilai nominal

Ketentuan maksimum dan minimum Kas *on hand* diatur dalam Surat Keputusan Direksi.

Pada prinsipnya pengelolaan kas berpedoman pada asas *benefit* dan kemungkinan risiko dalam arti kas yang dikelola mampu memberikan manfaat maksimal dan dengan risiko yang minimal sehingga kas dalam khasanah BPR dipelihara sesuai kebutuhan operasional dan meminimalkan *idle cash*.

2. Surat Berharga

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) diklasifikasikan menjadi dua yaitu dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual. SBI yang dimiliki hingga jatuh tempo dilaporkan sebesar biaya perolehan dikurangi diskonto yang belum diamortisasi dan ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi. Sedangkan untuk SBI yang tersedia untuk dijual dilaporkan sebesar nilai wajar. Saat ini BPR belum menempatkan dananya dalam bentuk SBI.

3. Penempatan pada bank lain dan penyisihan penghapusan aset produktif

Penempatan pada bank lain terdiri dari : giro pada bank umum, tabungan pada bank lain, deposito berjangka pada bank lain dan sertifikat deposito pada bank umum.

Penempatan dana pada bank lain disajikan sebesar nilai nominal penyetoran atau nilai yang diperjanjikan sesuai jenis penempatan. Pendapatan bunga diakui secara akrual sebesar jumlah yang menjadi hak BPR. Amortisasi diskonto dilakukan secara garis lurus dan diakui sebagai pendapatan bunga.

Penyisihan penghapusan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian atas dana yang ditempatkan pada bank lain disajikan sebagai pengurang (offsetting account) dari penempatan dana pada bank lain tersebut (jika ada penurunan nilai atas kemungkinan kerugian).

4. Kredit yang diberikan dan penyisihan penghapusan aset produktif

BPR mengakui kewajiban komitmen fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur sebesar plafon kredit yang diperjanjikan atau dapat ditarik sesuai jadwal penarikan/penggunaan kredit yang disepakati BPR dengan debitur. Yang dilaporkan dalam pos ini adalah sebesar baki debet neto yaitu baki debet dikurangi dengan provisi yang belum diamortisasi dan ditambah dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi. Provisi diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus, kecuali pinjaman dengan plafond Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ke bawah diakui seluruhnya sebagai pendapatan pada saat realisasi kredit.

Biaya transaksi dalam rangka pemberian kredit diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus, kecuali pinjaman dengan plafond Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ke bawah diakui seluruhnya sebagai pendapatan pada saat realisasi kredit. Amortisasi Provisi dan Biaya Transaksi dilakukan tanpa memperhatikan apakah kredit itu termasuk performing atau non performing.

Penyisihan penghapusan aset produktif dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam kredit. Besarnya penyisihan penghapusan aset produktifitas kredit yang diberikan ditentukan dengan memperhatikan kualitas kredit dan nilai agunan yang tersedia. Pembentukan penyisihan tersebut dilakukan secara harian atau pada setiap tanggal laporan keuangan. BPR wajib membentuk penyisihan penghapusan aset produktif minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beban penyisihan penghapusan aset produktif disajikan setelah beban bunga dan beban kerugian restrukturisasi. Saldo penyisihan penghapusan aset produktif disajikan sebagai pos pengurang dari kredit yang diberikan. Penerimaan setoran kredit yang dihapus buku/hapus tagih disajikan secara terpisah dalam pendapatan operasional lainnya.

5. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

Agunan Yang Diambil Alih adalah aset yang diperoleh BPR dalam rangka penyelesaian kredit dan bersifat sementara untuk segera diselesaikan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada BPR. BPR wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap Agunan Yang Diambil Alih yang dimiliki yaitu mengupayakan penjualan dengan segera serta mendokumentasikannya.

Agunan Yang Diambil Alih tidak disusutkan. BPR tidak boleh mengakui keuntungan pada aset pengambilalihan aset. Hasil penjualan Agunan Yang Diambil Alih diakui sebagai pengurang tagihan yang terkait dengan kredit. Agunan Yang Diambil Alih disajikan secara terpisah dari aset lainnya sebesar nilai pada saat perolehan awal yaitu nilai wajar setelah dikurangi biaya-biaya penjualan maksimum sebesar baki debet kredit debitur kepada BPR. Untuk periode

selanjutnya, nilai yang dilaporkan adalah sebesar nilai wajar setelah dikurangi biaya-biaya penjualan atas AYDA atau nilai tercatat, mana yang lebih rendah.

2. Aset Tetap dan inventaris serta akumulasi penyusutan dan penurunan nilai

Aset Tetap dan inventaris dinyatakan sebesar biaya perolehan (cost), sedangkan penyusutannya didasarkan pada metode garis lurus untuk bangunan dan inventaris.

1. Tanah tidak disusutkan
2. Golongan I disusut 25% dari harga perolehan
3. Golongan II disusut 12,5% dari harga perolehan
4. Golongan IV disusut 5% dari harga perolehan

Dalam hal aset tetap dan inventaris yang diperoleh melalui pembelian secara tidak tunai, maka biaya perolehannya adalah setara dengan nilai tunai pada saat tanggal pengakuan. Aset tetap dan inventaris yang diperoleh dari sumbangan pemilik diakui sebagai bagian modal sumbangan. Sedangkan untuk aset tetap dan inventaris yang diperoleh bukan dari sumbangan pemilik dan diperoleh dari undian berhadiah diakui sebagai pendapatan non operasional.

Perolehan aset dan inventaris melalui sewa pembiayaan (financial lease) merupakan asset tetap dan inventaris yang diperoleh melalui sewa (lease) apabila sewa tersebut merupakan sewa pembiayaan dan harus memenuhi syarat agar dapat diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Biaya perolehan aset tetap yang diperoleh melalui sewa adalah nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa ditambah nilai residu (harga opsi) yang harus dibayar pada akhir masa sewa.

Aset tetap dan inventaris disajikan berdasarkan nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada). Surplus revaluasi aset tetap disajikan sebagai pos tersendiri dalam ekuitas. Aset tetap dan inventaris yang berasal dari sewa pembiayaan disajikan tersendiri dalam pos aset tetap dan inventaris. Kewajiban sewa pembiayaan disajikan dalam Pinjaman yang diterima.

3. Aset tidak berwujud serta akumulasi amortisasi dan penurunan nilai

Aset tidak berwujud adalah aset non moneter yaitu tidak mempunyai wujud fisik namun dapat diidentifikasi dan digunakan untuk operasional antara lain program aplikasi (software) yang diperoleh secara eksternal. Aset tidak berwujud disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan penurunan nilai.

4. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri. Aset Lainnya disajikan secara gabungan, kecuali nilainya material maka wajib disajikan tersendiri dalam neraca, meliputi rincian Aset Lainnya dan kebijakan akuntansi yang melekat pada akun Aset Lainnya.

5. Liabilitas Segera

Liabilitas Segera berasal dari aktivitas pendukung kegiatan operasional BPR baik terhadap masyarakat maupun terhadap bank lain. Pengakuan terhadap liabilitas/kewajiban segera adalah pada saat kewajiban telah jatuh tempo atau kewajiban menjadi segera dapat ditagih oleh pemiliknya, baik dengan perintah dari pemberi amanat maupun tidak. Liabilitas Segera disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Utang pajak merupakan selisih kurang atas kewajiban pajak penghasilan BPR setelah memperhitungkan angsuran pajak atau pajak dibayar di muka. Utang pajak disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Termasuk di antaranya utang pajak atas sewa dan pajak penghasilan atas bunga tabungan dan deposito yang bersifat masa.

6. Tabungan

Yaitu simpanan milik pihak ketiga bukan bank. Nilainya adalah sebesar saldo tabungan nasabah setelah dikurangi dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi.

Transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran. Beban bunga simpanan meliputi bunga kontraktual atas simpanan dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada simpanan tersebut. Dalam hal terdapat amortisasi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada tabungan maka diakui sebagai beban bunga.

7. Deposito

Deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito.

8. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain adalah kewajiban BPR kepada bank lain, dalam bentuk tabungan dan deposito. Simpanan dari bank lain tidak termasuk pinjaman dari bank lain yang akan dicatat pada pos Pinjaman Diterima.

9. Pinjaman Diterima

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai pokok pinjaman ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan pinjaman dikurangi diskonto. Biaya transaksi diamortisasi secara garis lurus dan diakui sebagai beban bunga. Beban akrual atas pinjaman diterima diakui sebagai utang bunga.

Pinjaman diterima disajikan sebesar saldo pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal laporan serta biaya transaksi dan diskonto yang belum diamortisasi. Bunga yang masih harus dibayar disajikan dalam pos utang bunga. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik oleh BPR disajikan sebagai tagihan komitmen pada pos fasilitas pinjaman diterima yang belum ditarik (dimasukkan dalam Rekening Administratif).

10. Dana Setoran Modal – Kewajiban

Dana setoran modal yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku merupakan kewajiban BPR kepada penyetor. Dana Setoran modal yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku merupakan bagian ekuitas BPR.

Dana setoran modal yang diterima diakui sebagai Dana Setoran Modal – Kewajiban. Dana setoran modal yang telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku diakui sebagai Dana Setoran Modal – Ekuitas.

Dana Setoran Modal – Kewajiban disajikan dalam pos tersendiri sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

11. Liabilitas Lainnya

Liabilitas Lainnya diakui sebesar jumlah yang harus diselesaikan dan disajikan secara gabungan, kecuali nilainya material maka wajib disajikan tersendiri dalam neraca. Di antaranya adalah Kewajiban imbalan kerja. Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan BPR atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Termasuk dalam kelompok Liabilitas Lainnya adalah utang bunga, merupakan pos yang dimaksudkan untuk menambah kewajiban BPR yang timbul dari pengakuan biaya bunga dari aktivitas yang terkait dengan fungsi BPR. Termasuk dalam pengertian utang bunga adalah utang bunga yang timbul dari transaksi seperti sewa pembiayaan, pinjaman diterima, pinjaman subordinasi dan modal pinjaman.

Utang bunga antara lain terdiri dari :

- a. Kewajiban bunga yang telah menjadi beban BPR tetapi belum dibayar (akrual bunga)
- b. Bunga deposito yang sudah jatuh tempo namun belum diambil oleh nasabah
- c. Bunga dari transaksi lainnya yang sudah jatuh tempo namun belum diambil

Utang bunga diakui sejumlah jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual bunga maupun yang telah jatuh tempo. Utang bunga disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

12. Modal

Modal disetor merupakan bagian dari modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemegang saham. Modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal bank berupa dana kas maupun aset non kas. Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominal yang bersangkutan. Apabila jumlah yang diterima lebih besar daripada nilai nominalnya, maka selisihnya dibukukan pada akun Agio Saham.

Penyajian modal dalam neraca harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Anggaran Dasar BPR dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. Modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, nilai nominal dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham harus dinyatakan dalam neraca. Tambahan modal disetor disajikan dalam kelompok pos ekuitas.

13. Modal sumbangan

Modal Sumbangan adalah modal berupa kas atau aset non kas yang merupakan sumbangan dari pemilik. Modal Sumbangan berupa kas dinilai sebesar kas yang diterima. Sedangkan sumbangan berupa aset non kas dinilai sebesar nilai wajar aset non kas yang diterima. Modal Sumbangan disajikan dalam kelompok pos ekuitas sesudah akun Modal Disetor (Modal dasar dikurangi modal yang belum disetor).

14. Dana Setoran Modal – Ekuitas
Dana Setoran Modal – Ekuitas merupakan dana setoran modal yang sebelumnya disajikan dalam komponen kewajiban dalam pos Dana Setoran Modal – Kewajiban. Dana setoran modal yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku merupakan kewajiban BPR kepada penyeter. Sedangkan yang telah dinyatakan memenuhi ketentuan merupakan bagian ekuitas BPR.
15. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dan inventaris sebelum dilakukan revaluasi. Disajikan sebagai pos tersendiri dalam ekuitas. Pengungkapannya meliputi dasar yang digunakan, tanggal efektif revaluasi, pihak yang melakukan penilaian, jumlah tercatat jenis aset tetap dan inventaris sebelum revaluasi dan jumlah keuntungan revaluasi aset tetap yang direklasifikasi ke saldo laba.
16. Cadangan Umum
Cadangan umum, sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas adalah sebesar 20% dari modal disetor.
17. Cadangan Tujuan
Cadangan tujuan dibentuk dari laba netto setelah pajak yang tujuan penggunaannya sudah ditetapkan.
18. Laba (Rugi) Tahun-tahun Lalu
Saldo laba yang merupakan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian deviden dan koreksi laba rugi periode lalu.
19. Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Saldo laba bersih (netto) yang merupakan hasil usaha dalam periode tahun berjalan.
20. Pendapatan Bunga
Pendapatan dan biaya bunga dihitung atas dasar accrual Basis. Pendapatan bunga atas aset produktif yang diklasifikasikan sebagai Non Performing tidak diakui dalam akun sampai saat diterimanya pembayaran. Bunga atas aset produktif Non Performing dimasukkan dalam Rekening Administratif.
Pendapatan bunga meliputi antara lain pendapatan bunga kontraktual serta amortisasi provisi, diskonto dan biaya transaksi yang terkait dengan aset produktif, serta amortisasi pendapatan bunga yang ditangguhkan. Pendapatan bunga dari kredit yang masuk kategori performing diakui secara akrual, sedangkan dari kredit yang termasuk kategori non performing loan diakui secara kas. Provisi sebagai penambah pendapatan bunga dan biaya transaksi sebagai pengurang pendapatan bunga diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus.
21. Pendapatan Non Operasional
Pendapatan Non Operasional berasal dari kegiatan jasa yang mendukung operasional BPR sesuai dengan ketentuan, antara lain jasa pengiriman uang, pendapatan administrasi

tabungan, denda kredit dan sebagainya. Pendapatan Non Operasional diakui sebesar jumlah yang menjadi hak BPR dan disajikan terpisah dalam laporan laba rugi.

22. **Beban Bunga**

Beban bunga merupakan beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman. Beban bunga diakui secara akrual dan dinilai sebesar jumlah yang menjadi kewajiban BPR, termasuk beban lain yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana, misalnya premi penjaminan simpanan dan hadiah deposito berjangka. Beban bunga disajikan terpisah dari pendapatan bunga untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai komposisi dan alasan perubahan nilai neto bunga.

23. **Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit**

Kerugian restrukturisasi kredit disajikan sebelum beban operasional pada pos Beban Kerugian Restrukturisasi kredit. Penyisihan restrukturisasi kredit yang merupakan selisih antara nilai tercatat kredit dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan, disajikan sebagai pos pengurang dari kredit yang direstrukturisasi. Pendapatan bunga yang ditangguhkan, yang merupakan hasil konversi tunggakan bunga, disajikan sebagai pos pengurang dari kredit yang direstrukturisasi.

24. **Beban Non Operasional**

Beban Non Operasional merupakan semua beban yang berasal dari kegiatan yang bukan kegiatan utama BPR, misalnya kerugian yang timbul sebagai akibat penilaian kembali kas dalam valuta asing, penjualan aset tetap dan inventaris BPR serta denda atau sanksi karena pelanggaran. Beban Non Operasional diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang harus diselesaikan dan disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan laba rugi.

25. **Taksiran Pajak Penghasilan**

Taksiran Pajak Penghasilan adalah jumlah agregat beban pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode. Beban pajak penghasilan diakui pada saat terjadinya yaitu sebesar jumlah yang harus diselesaikan dan disajikan sebagai pos tersendiri dalam laporan laba rugi.

- **Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung yang menyajikan informasi perubahan historis penerimaan kas dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode. Dalam metode ini laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan/pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atas beban yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan.

- **Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa**

Sesuai dengan PSAK-ETAP tentang "Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan Istimewa". Yang dimaksud dengan mempunyai hubungan istimewa adalah :

1. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (intermediaries), mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian bersama dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies, subsidiaries, dan fellow subsidiaries).
2. Perusahaan Asosiasi (associated companies).
3. Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut.
Yang dimaksud dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perorangan tersebut.
4. Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Manager dari perusahaan serta anggota keluarga dekat.
5. Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan point 3 atau 4 atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan yang bersangkutan. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor. Seluruh transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan kondisi persyaratan normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
BPR. ARTHAPUSPA MEGA
TAHUN 2024**



**JALAN RAYA SELATAN NO. 21 ADIWERNA - TEGAL 52194
TELEPON: 0283443237**

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT. BPR ARTHAPUSPA MEGA
Alamat	JALAN RAYA SELATAN NO. 21 ADIWERNA TEGAL - JAWA TENGAH 52194
Nomor Telepon	(0283) 443237

Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola di PT. BPR Arthapuspa Mega pada tahun 2024 belum nampak membawa perkembangan yang positif karena menurunnya kinerja BPR di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang belum pulih.

PT. BPR Arthapuspa Mega memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kabupaten Tegal. Penerapan Tata Kelola didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan PT. BPR Arthapuspa Mega.

PT. BPR Arthapuspa Mega telah beroperasi selama 30 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kewajaran. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi bank yang sehat, kuat, membanggakan dan terdepan melayani masyarakat umum dan UMKM di Tegal, Brebes, Pemalang dan sekitarnya.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur dan Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus BPR dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2024 dan untuk di tahun mendatang, PT. BPR Arthapuspa Mega terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	3. Cukup Baik

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR. Arthapuspa Mega telah melaksanakan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran. Dalam hal terdapat kelemahan, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	Dadi Sumarsana
----	------	----------------

	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab: 1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BPR (Direktur Utama) 2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan 3. Menerapkan Tata Kelola dan Manajemen Risiko pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi 4. Menunjuk pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan dan Unit Kerja Khusus Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) 5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya 6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional 7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan 8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai 9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris 10. Menjalankan tugas yang lebih berorientasi bisnis, termasuk pemasaran, pengembangan dan pengambilan kebijakan yang lebih makro. 11. Menginisiasi dan berpikir strategi rencana kerja jangka menengah dan jangka panjang 12. Meningkatkan networking hubungan antarlembaga baik sesama BPR, Bank Umum, regulator, Pemerintah dan pihak-pihak lain untuk kemajuan industri.
--	---

2.	Nama Mu'minatus Solihah
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab: 1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BPR (Direktur) 2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan 3. Menerapkan Tata Kelola dan Manajemen Risiko pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi 4. Menunjuk pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan 5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya 6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional 7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan 8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai 9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada

	Dewan Komisaris
	10. Menjalankan kebijakan operasional sehari-hari, Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT yang bersifat rutin
	11. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kerja dan kepatuhan
	12. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip- prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi
	13. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman bank
	14. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya sadar risiko di semua lini organisasi
	15. Bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha BPR

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

Direksi telah menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan Limit Risiko Penerapan Manajemen Risiko yang telah disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi kinerja keuangan BPR terkini.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Mastika
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab: - Sebagai Komisaris Utama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RBB serta memberikan nasehat kepada Direksi - Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi - Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) - Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR - Memberikan persetujuan terkait penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan - Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya - Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris - Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan manajemen risiko, kepatuhan dan APU, PPT dan PPPSPM	
2.	Nama	Cipto Budhi Prayitno
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab: - Sebagai Komisasris dan Independen, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RBB serta memberikan nasehat kepada Direksi - Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi - Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) - Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR - Memberikan persetujuan terkait penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan - Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari	

	satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya 7. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris 8. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan manajemen risiko, kepatuhan dan APU, PPT dan PPPSPM
--	--

Rekomendasi Kepada Direksi:

1. Peninjauan dan penyesuaian kembali Risk Appetite dan Risk Tolerance
2. Penguatan proses monitoring dan early warning System
3. Peningkatan peran PE Manajmen Risiko

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR		
1.	Nama	Dadi Sumarsana
	Persentase Kepemilikan (%)	13,33

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR		
1.	Nama	Mastika
	Persentase Kepemilikan (%)	11,00

Sdr. Dadi Sumarsana memiliki 933.200 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 per lembar dan Sdr. Mastika memiliki 770.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 per lembar.

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR		
1.	Nama	Dadi Sumarsana
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Mu'minatus Solihah
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun	0,00

	Sebelumnya	
--	------------	--

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Mastika
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Cipto Budhi Prayitno
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Dadi Sumarsana
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Mu'minatus Solihah
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Mastika
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Cipto Budhi Prayitno
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Dadi Sumarsana
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Mu'minatus Solihah
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Mastika
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Cipto Budhi Prayitno
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Tidak Ada.

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR		
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR		
Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR		
1.	Nama	Nani Iriani
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Dadi Sumarsana - Suami
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak Ada
2.	Nama	Umi Yasaroh
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Mastika - suami
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak Ada

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp626.496.071
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp361.828.685
1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp50.656.650
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang

Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp29.472.960
---	--------------

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp0

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima	0 orang

Perumahan (Orang)	
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	1 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp74.400.000
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	1 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp69.600.000

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	1 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp1.370.000
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	1 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp950.000

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

Fasilitas transportasi bagi Direktur Utama dan Komisaris Utama selain berupa sewa kendaraan adalah seluruh biaya operasional atas kendaraan tersebut. Untuk Direktur adalah kendaraan inventaris kantor beserta seluruh biaya operasionalnya, sedangkan untuk Komisaris diberikan fasilitas berupa biaya operasional atas kendaraan pribadinya. Fasilitas kesehatan untuk seluruh pengurus diberikan dalam bentuk kepesertaan BPJS Kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (at cost).

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah	
Rasio (a/b)	6,08 : 1
2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah	
Rasio (a/b)	1,55 : 1
3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	
Rasio (a/b)	1,68 : 1
4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	
Rasio (a/b)	1,68 : 1
5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi	
Rasio (a/b)	2,36 : 1

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	19 Januari 2024
	Jumlah Peserta	3 orang
Topik/Materi Pembahasan: Rencana MPP Bpk. Marsono (Kepala Bagian Penyehatan dan Pengamanan Kredit) dan kemungkinan perubahan struktur organisasi		
2.	Tanggal Rapat	27 Februari 2024
	Jumlah Peserta	4 orang
Topik/Materi Pembahasan: Pembahasan NPL, AYDA dan Kasus Budi Susanto Sidik.		
3.	Tanggal Rapat	21 Maret 2024
	Jumlah Peserta	4 orang
Topik/Materi Pembahasan: Pembahasan Laporan Keuangan audit KAP, pembagian THR, Libur Hari Raya, Cuti Bersama dan pengesahan Laporan Keuangan 2023.		
4.	Tanggal Rapat	07 Mei 2024
	Jumlah Peserta	4 orang

	Topik/Materi Pembahasan: Rapat tindak lanjut temuan audit dan koordinasi tentang Gaji.	
5.	Tanggal Rapat	18 Mei 2024
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Pembahasan action plan audit KAP, Revisi RBB dan Konsep acara Ulang Tahun BPR. Arthapuspa Mega	
6.	Tanggal Rapat	07 Juni 2024
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Pembahasan tindak lanjut perlunya koreksi RBB 2024, langkah- langkah untuk menindaklanjuti RBB agar tercapai, perubahan nomenklatur dan penerimaan pegawai	
7.	Tanggal Rapat	10 Juli 2024
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Pembahasan acara HUT Bank APM, penambahan pegawai, dan penggunaan E-Collector	
8.	Tanggal Rapat	18 Juli 2024
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Evaluasi kinerja kredit dan struktur organisasi baru	
9.	Tanggal Rapat	13 Agustus 2024
	Jumlah Peserta	7 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Pembahasan penyebab penurunan OS kredit	
10.	Tanggal Rapat	18 September 2024
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Pembahasan perubahan nomenklatur dan PKs dengan Penasehat Hukum Bp. Mukhidin, SH	
11.	Tanggal Rapat	24 September 2024
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Pembahasan perubahan struktur gaji 2024 (temuan OJK)	

	Tanggal Rapat	15 Oktober 2024
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Koordinasi penyesuaian perubahan nomenklatur, pegawai pensiun, mutasi dan promosi pegawai.	
13.	Tanggal Rapat	09 Desember 2024
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Pembahasan dan persetujuan RBB 2025	

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun		
1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Mastika
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	13 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Cipto Budhi Prayitno
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	11 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses	0 kasus

Hukum Pada Tahun Laporan	
1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus
1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	1 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	1 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus
1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai	
Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian	
Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2024 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik		
1.	Tanggal Pelaksanaan	18 Januari 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	deposan

	Penjelasan Kegiatan	karangan bunga utk deposan
	Jumlah (Rp)	Rp750.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	20 Januari 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	deposan
	Penjelasan Kegiatan	sumbangan utk kondangan pernikahan nasabah
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	20 Januari 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	deposan
	Penjelasan Kegiatan	parcel utk kondangan pernikahan nasabah
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
4.	Tanggal Pelaksanaan	06 Februari 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	deposan
	Penjelasan Kegiatan	Tilik umroh deposan
	Jumlah (Rp)	Rp265.530
5.	Tanggal Pelaksanaan	23 Maret 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	santunan shodaqoh persatuan kesuma bangsa kab tegal
	Jumlah (Rp)	Rp50.000
6.	Tanggal Pelaksanaan	02 April 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	santunan anak yatim piatu
	Jumlah (Rp)	Rp1.712.263
7.	Tanggal Pelaksanaan	04 April 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia

	Penjelasan Kegiatan	sumbangan gedung TPQ Beji - Banyumas
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
8.	Tanggal Pelaksanaan	06 April 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	Santunan anak yatim, jompo dan marbot masjid Tonggara
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
9.	Tanggal Pelaksanaan	17 April 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	sumbangan uang utk pemuda pancasila
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
10.	Tanggal Pelaksanaan	18 April 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	pegawai
	Penjelasan Kegiatan	uang duka utk ibu mertua pegawai
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
11.	Tanggal Pelaksanaan	29 April 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	pegawai
	Penjelasan Kegiatan	uang duka utk anak pegawai
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
12.	Tanggal Pelaksanaan	30 April 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	warga lingkungan kantor
	Penjelasan Kegiatan	parcel sembako untuk lingkungan kantor
	Jumlah (Rp)	Rp2.119.300
13.	Tanggal Pelaksanaan	04 Mei 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	pegawai
	Penjelasan Kegiatan	uang duka utk ibu mertua pegawai

	Jumlah (Rp)	Rp500.000
14.	Tanggal Pelaksanaan	11 Mei 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	pendirian ICMI Kab. Tegal
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
15.	Tanggal Pelaksanaan	15 Mei 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	deposan
	Penjelasan Kegiatan	karangan bunga meja utk peresmian hotel sida mulia bumiayu
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
16.	Tanggal Pelaksanaan	15 Mei 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	pegawai
	Penjelasan Kegiatan	bingkisan utk nengok haji
	Jumlah (Rp)	Rp299.500
17.	Tanggal Pelaksanaan	15 Mei 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	debitur
	Penjelasan Kegiatan	bingkisan utk nengok haji
	Jumlah (Rp)	Rp181.100
18.	Tanggal Pelaksanaan	15 Mei 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	debitur
	Penjelasan Kegiatan	bingkisan utk nengok haji
	Jumlah (Rp)	Rp110.000
19.	Tanggal Pelaksanaan	17 Mei 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	relasi
	Penjelasan Kegiatan	bingkisan utk nengok haji
	Jumlah (Rp)	Rp300.000

20.	Tanggal Pelaksanaan	18 Mei 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	debitur
	Penjelasan Kegiatan	bingkisan utk nengok haji
	Jumlah (Rp)	Rp306.150
21.	Tanggal Pelaksanaan	21 Mei 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	debitur
	Penjelasan Kegiatan	bingkisan utk nengok haji
	Jumlah (Rp)	Rp280.950
22.	Tanggal Pelaksanaan	30 Mei 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Pemegang Saham
	Penjelasan Kegiatan	sumbangan utk pemegang saham dirawat di RS
	Jumlah (Rp)	Rp2.500.000
23.	Tanggal Pelaksanaan	31 Mei 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	relasi
	Penjelasan Kegiatan	BY KARANGAN BUNGA PEMBUKAAN BPR BKK KAB TEGAL
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
24.	Tanggal Pelaksanaan	03 Juni 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	keluarga PS
	Penjelasan Kegiatan	uang duka utk takziah bpk h dekrit
	Jumlah (Rp)	Rp5.000.000
25.	Tanggal Pelaksanaan	03 Juni 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	pegawai
	Penjelasan Kegiatan	uang duka utk mertua pegawai
	Jumlah (Rp)	Rp500.000

26.	Tanggal Pelaksanaan	05 Juni 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	keluarga PS
	Penjelasan Kegiatan	karangan bunga untuk pemegang saham
	Jumlah (Rp)	Rp550.000
27.	Tanggal Pelaksanaan	26 Juni 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	keluarga debitur
	Penjelasan Kegiatan	bingkisan utk takziah debitur
	Jumlah (Rp)	Rp298.500
28.	Tanggal Pelaksanaan	29 Juni 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	sumbangan dalam rangka 1 Muharam
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
29.	Tanggal Pelaksanaan	04 Juli 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	tumpeng utk HUT bhayangkara
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
30.	Tanggal Pelaksanaan	05 Juli 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	pegawai
	Penjelasan Kegiatan	kado pernikahan pegawai (1)
	Jumlah (Rp)	Rp673.500
31.	Tanggal Pelaksanaan	05 Juli 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	pegawai
	Penjelasan Kegiatan	kado pernikahan pegawai (2)
	Jumlah (Rp)	Rp673.500
32.	Tanggal Pelaksanaan	16 Juli 2024

	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	pembangunan gerbang desa RW.05 Tonggara
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
33.	Tanggal Pelaksanaan	23 Juli 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	by karangan bunga hut ke 68 bank danamon
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
34.	Tanggal Pelaksanaan	27 Juli 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	santunan anak yatim Jamiyah Khuriyatul Hilal
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
35.	Tanggal Pelaksanaan	27 Juli 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	santunan anak yatim jamiaya Roudhotul Sallam
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
36.	Tanggal Pelaksanaan	31 Juli 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	perorangan
	Penjelasan Kegiatan	santunan anak yatim dan dhuafa HUT Bank APM
	Jumlah (Rp)	Rp16.346.500
37.	Tanggal Pelaksanaan	05 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	debitur
	Penjelasan Kegiatan	bingkisan utk takziah debitur
	Jumlah (Rp)	Rp275.300
38.	Tanggal Pelaksanaan	10 Agustus 2024

	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	relasi
	Penjelasan Kegiatan	sumbangan silaturahmi umroh
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
39.	Tanggal Pelaksanaan	15 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	instansi
	Penjelasan Kegiatan	bantuan utk cat mobil polsek adiwerna
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
40.	Tanggal Pelaksanaan	15 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	instansi
	Penjelasan Kegiatan	partisipasi DPD lembaga wartawan indonesia
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
41.	Tanggal Pelaksanaan	16 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	sumbangan hut ri kec tarub
	Jumlah (Rp)	Rp250.000
42.	Tanggal Pelaksanaan	16 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	sumbangan hut ri Ds. blubuk
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
43.	Tanggal Pelaksanaan	16 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	sumbangan hut ri rt 2 rw 2 bumiharja
	Jumlah (Rp)	Rp100.000
44.	Tanggal Pelaksanaan	20 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial

	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	sumbangan HUT RI kec. Bojong
	Jumlah (Rp)	Rp250.000
45.	Tanggal Pelaksanaan	20 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	sumbangan HUT RI kec. dukuhwaru
	Jumlah (Rp)	Rp250.000
46.	Tanggal Pelaksanaan	20 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	sumbangan HUT RI kec. adiwerna
	Jumlah (Rp)	Rp250.000
47.	Tanggal Pelaksanaan	20 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	deposan
	Penjelasan Kegiatan	sumbangan utk tilik umroh SMK BP Dk waru
	Jumlah (Rp)	Rp284.300
48.	Tanggal Pelaksanaan	21 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan HUT RI Ds. tembok luwung RW07
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
49.	Tanggal Pelaksanaan	21 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan HUT RI Kel. Pasarbatang Brebes
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
50.	Tanggal Pelaksanaan	21 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia

	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan HUT RI Kel. Procot
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
51.	Tanggal Pelaksanaan	24 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	relasi
	Penjelasan Kegiatan	by karangan bunga pelantikan ICMI & Milad Bank Mega Syariah
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
52.	Tanggal Pelaksanaan	26 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	sumbangan perkemahan jambore se kec. talang
	Jumlah (Rp)	Rp250.000
53.	Tanggal Pelaksanaan	26 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	keluarga debitur
	Penjelasan Kegiatan	Takziah debitur
	Jumlah (Rp)	Rp201.600
54.	Tanggal Pelaksanaan	27 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	partsipasi HUT RI ke 79, lingkungan rt 07/05 kel pasarbatang
	Jumlah (Rp)	Rp100.000
55.	Tanggal Pelaksanaan	17 September 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	pegawai
	Penjelasan Kegiatan	uang duka utk ortu pegawai
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
56.	Tanggal Pelaksanaan	17 September 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	deposan

	Penjelasan Kegiatan	buah utk deposan
	Jumlah (Rp)	Rp1.300.000
57.	Tanggal Pelaksanaan	24 September 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	deposan
	Penjelasan Kegiatan	Besuk sakit deposan
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
58.	Tanggal Pelaksanaan	24 September 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	santunan anak yatim piatu SMK Diponegoro
	Jumlah (Rp)	Rp1.950.000
59.	Tanggal Pelaksanaan	26 September 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	deposan
	Penjelasan Kegiatan	parcel untuk jenguk deposan
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
60.	Tanggal Pelaksanaan	26 September 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	deposan
	Penjelasan Kegiatan	parcel buah utk jenguk deposan
	Jumlah (Rp)	Rp250.000
61.	Tanggal Pelaksanaan	26 September 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	jam dinding untuk masjid Tonggara
	Jumlah (Rp)	Rp420.000
62.	Tanggal Pelaksanaan	02 Oktober 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	Jariyah pemasangan tralis masjid Tonggara

	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
63.	Tanggal Pelaksanaan	02 Oktober 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	pembangunan kelas baru untuk SDN Cilongok
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
64.	Tanggal Pelaksanaan	19 Oktober 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	penabung
	Penjelasan Kegiatan	utk jenguk penabung
	Jumlah (Rp)	Rp250.000
65.	Tanggal Pelaksanaan	22 Oktober 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	kegiatan sarasehan Yaumi Ke. Adiwerna
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
66.	Tanggal Pelaksanaan	25 Oktober 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	karangan bunga penarikan undian tab dan depo PT. BPR BKK CILACAP(PERSERODA)
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
67.	Tanggal Pelaksanaan	29 Oktober 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	karangan bunga HUT ke 34 BPR Nusumma
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
68.	Tanggal Pelaksanaan	29 Oktober 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	relasi
	Penjelasan Kegiatan	karangan bunga meninggalnya Dirut BPR
	Jumlah (Rp)	Rp500.000

69.	Tanggal Pelaksanaan	31 Oktober 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	deposan
	Penjelasan Kegiatan	Karangan bunga dukacita ayah deposan
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
70.	Tanggal Pelaksanaan	14 November 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	renovasi pagar dan paving masjid Babussalam Pegirikan
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
71.	Tanggal Pelaksanaan	16 November 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Pemegang Saham
	Penjelasan Kegiatan	uang duka utk ayah Pemegang Saham
	Jumlah (Rp)	Rp5.000.000
72.	Tanggal Pelaksanaan	18 November 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Pemegang saham
	Penjelasan Kegiatan	Karangan bunga Ayah Mertua Pemegang Saham
	Jumlah (Rp)	Rp650.000
73.	Tanggal Pelaksanaan	18 November 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan rehab masjid pangeran Purboyo Kalisoka
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
74.	Tanggal Pelaksanaan	23 Desember 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	Partisiapsi acara hari ibu IWAPI Tegal
	Jumlah (Rp)	Rp500.000

75.	Tanggal Pelaksanaan	23 Desember 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	partisipasi HUT satpam ke 44 polres tegal
	Jumlah (Rp)	Rp80.000
76.	Tanggal Pelaksanaan	27 Desember 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	panitia
	Penjelasan Kegiatan	Sarasehan lintas generasi Bligo - Magelang
	Jumlah (Rp)	Rp2.500.000

Selama tahun 2024 BPR telah memberikan dana sebesar Rp 72.827.993,00 untuk kegiatan sosial dan tidak ada yang ditujukan untuk kegiatan politik.

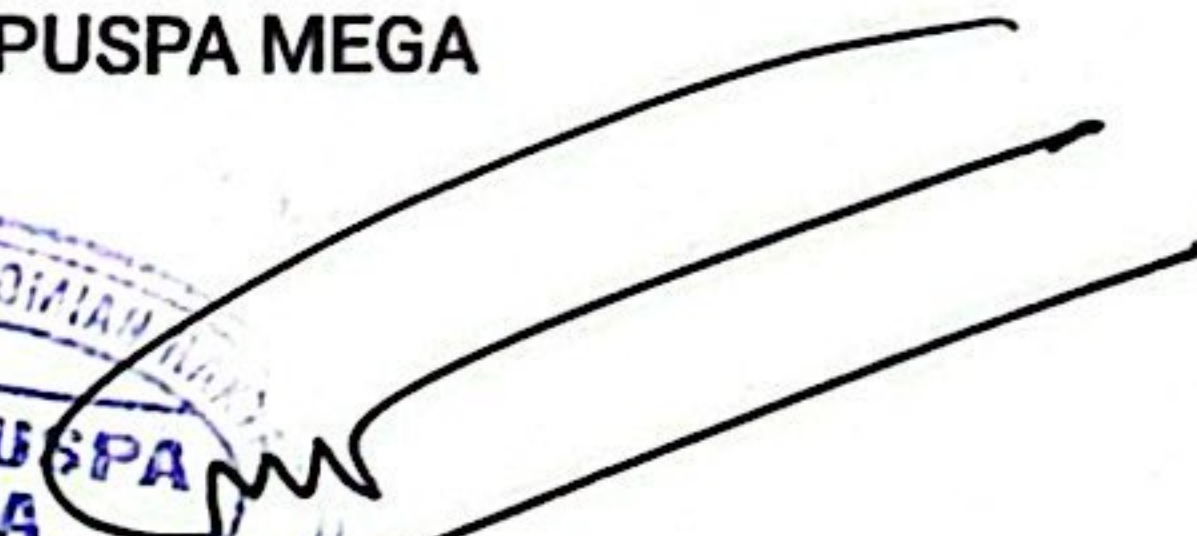
Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi BPR. ARTHAPUSPA MEGA untuk tahun 2024. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tegal, 06 Mei 2025

BPR. ARTHAPUSPA MEGA



Mastika, SE
Komisaris Utama

Dadi Sumarsana, Drs, SH, MM
Direktur Utama

ten